

Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Pembangunan Desa

Jabaran^{1*}, Frances Roi Seston Tampubolon²

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka¹

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka²

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 20, 06, 2024
Disetujui 22, 06, 2024
Diterbitkan 24, 06, 2024

Katakunci:

Village,
Community,
Observation,
Program
Development

ABSTRACT

Community empowerment in village development is very necessary, this can be used as a form of cooperation between the government and the community. Community empowerment can be carried out by many elements: government, universities, non-governmental organizations, the press, political parties, donor agencies, artists, civil society, or local community organizations themselves. This research method is a descriptive-qualitative research method, with data sources obtained from primary and secondary data. The data collection technique uses observation techniques. The results of the research obtained several solutions in empowering the community to implement village development, namely creating a climate, strengthening power, and protecting and the Rural Development Program.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Jabaran

Universitas Terbuka

Email: jabaranaban1234@gmail.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Jabaran, & Tampubolon, F. R. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Pembangunan Desa. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(2), 229~233. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i2.2704>

1. PENDAHULUAN

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistik, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika ini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan kunci dalam mencapai pembangunan desa yang maju dan sejahtera. Hal ini karena masyarakat desa adalah aktor utama dalam proses pembangunan desanya sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa dalam mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan memantau program pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya. Pemberdayaan Masyarakat desa juga memiliki tujuan sebagai berikut.

- Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
- Memperkuat kelembagaan desa.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya desa.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam implementasi pembangunan desa merupakan topik yang penting dan terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat desa diberdayakan dalam proses pembangunan desa, dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat desa. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Karya tulis ini lebih memfokuskan pada solusi berbagai strategi dalam pemberdayaan Masyarakat di desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif- kualitatif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini adalah gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, karena fokus penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) atau sering disebut metode etnographi.

Berikut ini beberapa fokus utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.
2. Identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa.
3. Pengembangan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus, studi kasus artinya Mendalami salah satu desa untuk memahami secara mendalam bagaimana pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pembangunan desa. Selanjutnya melakukan survei, survei adalah Mengumpulkan data dari sampel masyarakat desa untuk mengetahui pandangan, pengalaman, dan partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Dan akan dilakukan juga wawancara dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat desa, organisasi non-pemerintah (NGO), dan pihak swasta, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Terakhir apabila dibutuhkan akan dilakukan analisis dokumen dengan cara Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa, seperti kebijakan, peraturan, laporan, dan studi.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam implementasi pembangunan desa telah menghasilkan banyak temuan penting, antara lain:

- Pemberdayaan masyarakat desa merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa.
- Masyarakat desa yang diberdayakan lebih mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan desa.
- Terdapat berbagai strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan desa, dan efektivitas strategi dan pendekatan tersebut tergantung pada konteks desa.
- Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa meliputi kepemimpinan yang kuat, partisipasi masyarakat yang tinggi, akses terhadap informasi dan sumber daya, dan lingkungan yang kondusif.
- Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa meliputi kemiskinan, ketidaksetaraan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, dan birokrasi yang rumit.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam implementasi pembangunan desa memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan praktik pembangunan desa. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk:

- Mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, masyarakat desa, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- Memantau dan mengevaluasi kemajuan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Dengan memahami penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam implementasi pembangunan desa, kita dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih efektif untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

3. HASIL DAN DISKUSI

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut structural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). Ada beberapa Solusi strategi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan Masyarakat di desa.

Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan Lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari Upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Program Pembangunan Pedesaan

Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu :

1. Program pembangunan pertanian merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju.
2. Program industrialisasi pedesaan, Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan.
3. Program pembangunan masyarakat desa terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung Pembangunan pedesaan, dan membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.
4. Strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehadiran konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Berikut ini beberapa strategi yang akan dijelaskan dalam program pembangunan desa.

1. Strategi gotong royong, dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa membawa perubahan-perubahan pada masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.
2. Strategi Pembangunan teknikal – professional, dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen – agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program Pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara –cara yang lebih kreatif sehingga hambatan – hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.
3. Strategi Konflik, melihat keadaan kehidupan masyarakat saat ini dikuasasi oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada

perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

4. Strategi Pembelotan kultural menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis-relegius. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang betrkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

Harapannya dengan Solusi yang diberikan tadi akan dapat membantu program pemberdayaan desa secara maksimal.

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, actor artis, masyarakat sipil, atau organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa, seperti: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Dalam hal pada setiap desa telah membentuk KPM (Kader Pembangunan Manusia), maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, maka secara efektif pemerintahan desa (sistem politik lokal), keteladanan pemimpin (elit lokal), dan partisipasi aktif maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *AdbisPower*, 97.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Mereja Journal*, 135.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. *Thengkyang*, 1.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *POLITIKUM INDONESIA*, 43.
- Kementrian PUPR Badan Pengembangan SDM. (2017). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Prima Putra Budi Gutama, & Bambang Widiyahseno. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Unitri*, 71.
- Prof. Dr. Ir. Sriati, M. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan.
- Shuida, I. N. (2016). *Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Deputy Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan .
- Yunus, D. S., D. S., & F. M. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing.